

# PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL PUSTAKAWAN SEBAGAI PENGELOLA SUMBER INFORMASI

Oleh:  
A.C. Sungkana Hadi

Pustakawan Madya dan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Cenderawasih

## **Abstrak**

*Makalah ini membahas tentang peran dan tanggung jawab profesional pustakawan sebagai pengelola sumber informasi dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat dewasa ini. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sangat berhubungan langsung terhadap perkembangan layanan informasi prima. Hal ini berkaitan langsung dengan status dan peranan pustakawan sebagai pengelola informasi. Sebagai komponen penting dalam pengelolaan dan pelayanan informasi IPTEKS, pustakawan merupakan motor penggerak kemajuan peradaban. Untuk itu parapustakawan dituntut memiliki kualitas yang memadai, dan benar-benar bersikap dan bertindak profesional.*

**Keywords:** *Pustakawan; Layanan prima; Teknologi informasi; teknologi komunikasi; telematika; digitalisasi informasi; Indonesia DLN*

## **Pendahuluan**

Perpustakaan dan kepustakawanan diciptakan oleh dan lahir dari proses perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia. Bahkan diakui kemudian, bahwa berkat lembaga perpustakaan dan kepustakawanan maka kendati bentuk fisik hasil kemajuan peradaban manusia hancur dan punah, namun deskripsi dan informasi tentangnya masih tetap terpelihara dalam berbagai dokumen dan/atau kepustakaan. Kejayaan kekaisaran Romawi, kejeniusan pemikir-pemikir Yunani, ataupun keindahan bangunan-bangunan monumental dunia masih tetap dapat dilihat, dipelajari, dan dinikmati oleh umat manusia generasi sekarang ini. Itu semua berkat jasa para pustakawan kuno, yang terkadang harus menghadapi resiko kehilangan nyawa karena melindungi karya dokumenter umat manusia dari amukan api pemusnah sebagai akibat dari kekejaman perang.

Sebagai bagian dari pelaku perubahan dalam sejarah peradaban, para pustakawan berkarya sambil mencermati proses perubahan itu sendiri, sehingga dapat senantiasa menarik benang merah pertautan antara perubahan dan perkembangan itu dengan peran dan tanggung jawab mereka di dalamnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan menunjukkan peran pustakawan sebagai pengelola sumber informasi, perlu ditelusuri lebih dahulu sejarah lahir dan berkembangnya informasi tersebut, yang tiada lain adalah sejarah peradaban umat manusia itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, sejarah peradaban umat manusia ditandai dengan berbagai penemuan yang menghasilkan perubahan dan kemajuan. Penemuan roda dianggap sebagai salah satu tonggak perubahan yang sangat menentukan, karena dengan sistem yang berbasis roda maka segala sesuatu dapat digerakkan dengan lebih mudah. Dalam dunia ilmu pengetahuan dan informasi, penemuan

mesin cetak pada abad 15 juga merupakan salah satu tonggak perubahan yang sangat penting. Dengan mesin cetak maka segala bentuk informasi dapat dengan mudah digandakan dan kemudian disebarluaskan. Penemuan berikut yang dianggap sangat menentukan perkembangan peradaban hingga saat ini adalah penemuan mesin hitung yang dapat melaksanakan kegiatan aritmetika sendiri. Penemuan ini mendasari seluruh upaya **pengembangan komputasi** yang antara lain menghasilkan perangkat **komputer**.

Seluruh penemuan baru tersebut sesungguhnya merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan IPTEK ini melahirkan produk-produk teknologi yang mengagumkan, seperti sistem telegraph, telepon, sistem transistor, sistem pengiriman citra (*image*) atau televisi, sistem perekaman data, sistem memori, hingga sistem *chip*. Produk-produk tersebut biasa disebut sebagai teknologi komunikasi (TK) dan/atau teknologi informasi (TI). Istilah baru yang digunakan secara resmi oleh Pemerintah untuk cabang teknologi ini adalah teknologi **telematika (telekomunikasi, media, dan informatika)**. Pada tanggal **24 April 2001**, telah diterbitkan **Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia**.

Teknologi telematika itu sangat berperan dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. Teknologi telematika dihasilkan oleh adanya kemajuan IPTEK; sebaliknya teknologi telematika akan mempercepat terjadinya penemuan-penemuan baru, termasuk penemuan TK dan TI baru. Akibatnya banyak **produk yang lama cepat menjadi usang**, sehingga para pengguna – warga masyarakat dan semua yang terlibat dalam proses perubahan zaman – harus **selalu siaga untuk mempelajari penemuan baru**. Tidak terkecuali – dan bahkan merupakan tuntutan mutlak – bagi para pustakawan sebagai pengelola informasi IPTEK.

## Globalisasi

Salah satu dampak atau hasil dari kemajuan TK dan TI yang semakin pesat dewasa ini adalah terjadinya arus globalisasi, yakni arus perubahan dari yang semula berdimensi ruang dan waktu, menjadi **tanpa dimensi ruang dan waktu**, dari yang semula bersifat tersembunyi dan terbatas menjadi **terbuka dan transparan**, dari yang semula bersifat terlindungi menjadi terbuka untuk **persaingan bebas**, dari yang semula bersifat lokal atau spasial menjadi **bersifat global**. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, termasuk pemberdayaannya. Jika semula seorang calon sarjana dapat mengatakan bahwa perpustakaan tentang sesuatu yang akan ditulisnya sebagai tesis itu belum ada, karena tidak bisa diketemukan di sejumlah perpustakaan setempat yang ia kunjungi, maka dengan TK dan TI, para penguji sang calon sarjana dapat dengan mudah menunjukkan tersedianya perpustakaan itu di perpustakaan lain, baik perpustakaan yang berdingding (fisik konkrit), maupun perpustakaan tanpa dinding – atau perpustakaan maya (virtual) – di internet. Jika semula pengguna atau pengunjung perpustakaan merasa puas dan mengatakan “apa boleh buat” ketika mendapati kenyataan bahwa perpustakaan yang dicarinya tidak diketemukan, maka sekarang pengguna atau pengunjung perpustakaan dapat menuntut untuk dicarikan pada perpustakaan lain, termasuk pada perpustakaan maya di internet. “Tidak ada lagi dalam kamus mereka kesulitan dalam memperoleh pengetahuan dan informasi,” kata Dr. Onno W. Purbo (1999: 1, 110-111)<sup>i</sup>

Era globalisasi yang melanda itu memberikan dampak lain, yakni **meningkatnya tuntutan kualitas** yang semakin tinggi untuk hampir semua segi. Para pengguna perpustakaan di negara yang sudah maju sangat keras dalam menuntut kualitas layanan perpustakaan, termasuk kualitas sumber informasinya. Berkaitan dengan pasaran kerja, era globalisasi juga memberikan dampak meningkatnya

tuntutan kualitas (misalnya kualifikasi pendidikan, keterampilan, keprofesian) sebagai persyaratan pegawai baru. Pendeknya, setiap orang harus siap untuk bersaing dalam persaingan bebas, sementara dalam kenyataan belum tampak adanya kesiapan untuk itu. **Kualitas SDM** yang ada, termasuk SDM angkatan kerja, masih sangat **memprihatinkan**. Padahal tuntutan ini akan segera berlaku, yakni pada tahun 2003 untuk kawasan ASEAN (AFTA), 2010 untuk kawasan Asia Pasifik (APEC), dan 2020 untuk kawasan dunia seluruhnya (WTO).

Memenuhi tuntutan-tuntutan peningkatan tersebut tentu bukan hal yang mudah. Dalam konteks pengelolaan dan pelayanan informasi, misalnya, tentulah amat diharapkan dapat dilakukan peningkatan-peningkatan, misalnya: peningkatan kualitas pustakawan/staf perpustakaan (sebagian besar berpendidikan formal perpustakaan, dan diperoleh dari perguruan tinggi yang terkenal/diakui kualitasnya), peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan sistem, dan sebagainya. Masalahnya adalah, bahwa dukungan finansial untuk hal itu semua sangat terbatas, sementara berbagai komponen biaya dan harga terus meningkat kemahalannya. Demikian pula, dengan tuntutan **pelayanan prima dan cepat** (*instant*) yang berhadapan dengan keterbatasan sarana dan fasilitas penunjang, termasuk juga keterbatasan jumlah dan mutu tenaga (SDM). Padahal pelayanan prima ini, menurut **Endang Ernawati**<sup>ii</sup> merupakan strategi yang jitu untuk memasarkan jasa perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Dengan globalisasi juga terdapat tanda-tanda zaman yang cukup penting, yakni peningkatan kesadaran masyarakat akan **hak-hak asasi** mereka, termasuk hak memperoleh informasi. Informasi yang mereka butuhkan harus dapat dipenuhi dengan cepat, tepat, lengkap, dan mudah serta murah. Mereka bahkan cenderung menuntut layanan gratis, karena perpustakaan dipandang sebagai lembaga

publik yang bertugas melayani kepentingan masyarakat. Perpustakaan dibentuk dan dibiayai oleh negara untuk melayani masyarakat. Masyarakat telah membayar pajak kepada pemerintah, dan karenanya layanan oleh pemerintah bagi masyarakat harus bersifat gratis. Oleh karena itu, sulit diterima jika perpustakaan melakukan pungutan-pungutan tertentu, atau mewajibkan penggunaannya untuk membayar sejumlah biaya untuk layanan yang diterimanya. Di lingkungan perpustakaan, terutama perpustakaan umum, tidak dapat diterima dalih-dalih kewirausahaan, keswadanaan, apalagi komersialisasi, sekalipun tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menutup biaya dan harga informasi yang semakin mahal. Dalam kelompok diskusi I\_C\_S, yakni kelompok diskusi antar para pustakawan dan ilmuwan komputer di Indonesia melalui internet, topik **kewirausahaan** atau **komersialisasi perpustakaan** ini pernah dibahas dan menjadi perdebatan sengit hampir selama setengah tahun, dengan kesudahannya tanpa menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan yang ada adalah bahwa masalah tersebut perlu dicakup dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang perpustakaan yang sedang dipersiapkan.

## Warung Informasi

Perkembangan dan kemajuan TK dan TI membuka peluang usaha baru, yakni membuka warung telekomunikasi (wartel) dan warung internet (warnet), yang pada dasarnya merupakan prasarana untuk memperoleh dan/atau tukar menukar informasi, atau menurut Onno Purbo: **'sumber daya tempat bertanya.'** Bisnis ini tampaknya akan semakin berkembang, apalagi setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tersebut. Salah satu butir dalam Inpres tersebut adalah komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan wartel dan warnet, yang dikaitkan dengan upaya memperluas jangkauan dan kandungan informasi pelayanan publik, memperluas pelayanan

kesehatan dan pendidikan, mengembangkan sentra-sentra pelayanan masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta menyediakan layanan *e-commerce* bagi usaha kecil dan menengah.

Dengan peningkatan dan pendayagunaan fungsi warnet dan wartel tersebut, tampaknya setiap warga masyarakat akan dapat dengan leluasa memperoleh informasi yang mereka perlukan, bahkan juga menjelajahi dunia informasi global, sehingga dapat memperoleh informasi yang jauh lebih lengkap dan mutakhir tanpa harus mengunjungi suatu perpustakaan secara fisik. Kendati hanya (baru) sebagian kecil warga yang mampu mengakses layanan internet ini, namun tampaknya para pustakawan tetap harus mengambil langkah-langkah antisipasi agar pelanggannya jangan lari, dan cenderung berpindah ke warnet. Langkah yang diambil bukanlah menghalangi pengguna perpustakaan mengunjungi warnet, melainkan membuka dan menyediakan **layanan internet di perpustakaan**. Itu berarti bahwa para pustakawan harus menguasai TK dan TI. Penguasaan dan pemberdayaan TI mutakhir, menurut **Andreas Lako<sup>iii</sup>**, merupakan salah satu strategi bersaing manajemen perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan penggunaannya yang cenderung meningkat, menuntut sumber informasi yang akurat, bernilai, relevan, dan tepat waktu. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah revitalisasi layanan perpustakaan<sup>iv</sup>.

Sejalan dengan pengembangan warnet, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi beberapa waktu yang lalu telah meluncurkan program warung informasi juga, yakni warung informasi teknologi atau **WARINTEK**. Melalui warintek, dijajakan komoditi informasi yang siap pakai, seperti misalnya informasi tentang teknologi tepat guna (ITG) yang disediakan dalam bentuk CD-ROM. Dengan demikian, melalui warintek dapat diperoleh informasi yang relatif lebih gampang dan murah, karena tidak harus membayar biaya sambungan telepon atau satelit, seperti jika mengakses informasi dalam internet. Warintek

model ini dapat disebut sebagai warintek *offline*.

Sementara itu, melalui warintek dapat pula disajikan informasi atau data yang diangkat dari pengetahuan masyarakat setempat, atau biasa disebut *local contents*. Pengetahuan dan kekayaan intelektual setempat, terutama yang masih terekam dalam ingatan nara sumber atau informan setempat, dapat dieksplorasi, untuk kemudian direkam dan disajikan dalam warintek. Demikian pula halnya dengan potensi dan keunggulan daerah, yang juga dapat disajikan dalam warintek untuk diketahui masyarakat luas. Dalam konteks promosi dan pendesiminasian informasi tentang potensi dan keunggulan daerah ini, maka pengembangan warintek ke depan perlu mengarah kepada pemasangan dalam jaringan internet, atau dapat kita sebut sebagai warintek *online*.

## Digitalisasi Informasi

Tanda-tanda zaman terbaru yang terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi adalah pengembangan **perpustakaan digital (*digital library*)**, bahkan sudah dalam bentuk jaringan (*digital library network*). Di Indonesia ide-ide awal dikembangkan oleh para pakar TI di ITB yang tergabung dalam institusi *Knowledge Management Research Group* (KMRG). Hasil awal pengembangan mereka itu adalah diluncurkannya Perpustakaan Digital ITB yang diberi nama *Ganesha Digital Library* (GDL) pada tanggal 2 Oktober 2000 di Bandung. Peluncuran yang dilaksanakan dalam suatu Seminar Internasional itu ditindak-lanjuti dengan pertemuan pembentukan **Jaringan Perpustakaan Digital Indonesia** (3-4 Oktober 2000 di Lembang, Bandung), yang antara lain menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan **Jaringan Perpustakaan Digital Indonesia** yang diberi nama *IndonesiaDLN*. IndonesiaDLN ini telah diluncurkan pada bulan Juni 2001.

Pengembangan IndonesiaDLN juga menandai dimulainya tahapan baru, yakni tahap **pemberdayaan koleksi lokal** yang diyakini sebagai rekaman dari **ilmu pengetahuan setempat (*local contents*)**. Hal ini juga dibahas dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tersebut, yang dimasukkan dalam kategori pengembangan industri *information content*. Pengetahuan setempat yang selama ini terekam dalam ribuan naskah atau tulisan yang tidak pernah sempat dipublikasikan dianggap akan mubazir jika tidak diberdayakan melalui pemuatan naskah tersebut secara lengkap (*full text*) dalam **Jaringan Perpustakaan Digital Indonesia** itu. Tahap awal dari pengembangan IndonesiaDLN berupa kerja sama pengelolaan antara unit-unit perpustakaan yang belum mampu mengelola perpustakaan digitalnya sendiri dengan Ganesha Digital Library ITB. Tahap berikutnya, yang akan menjadi tanda-tanda zaman berikut, adalah pengembangan perpustakaan digital di masing-masing perpustakaan di seluruh Indonesia, dimulai dari perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan nasional propinsi, dan perpustakaan lainnya.

Dari segi pengembangan layanan, tanda zaman terbaru adalah upaya untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan maya keliling (*virtual mobile library*) yang dirintis oleh pemerintah Inggris, yakni layanan perpustakaan keliling yang bukan mengantarkan buku/koleksi perpustakaan kepada masyarakat penggunanya, melainkan mengantarkan komputer/PC agar dimanfaatkan untuk mengakses internet. Berikut ini kutipan berita yang dapat dibaca dari situs Kompas di internet:

”Perpustakaan mobil keliling boleh jadi dianggap barang kuno. Namun dalam rangka memasyarakatkan dunia Teknologi Informasi kepada semua orang, tidak lama lagi akan berkeliaran perpustakaan bus tingkat (*double decker*) di seantero Inggris. Tetapi kali ini isinya bukan buku, melainkan PC.”

...

"Tanpa mengakses komputer, masyarakat tidak akan bisa mengembangkan kemampuan mereka."

...

(sumber:

<http://www.kompas.com/it/news/0104/24/695.htm>)

Proyek hasil kerja sama perusahaan Nacro Net Navigator, didukung oleh Ericsson Telephone Co., British Telecommunications PLC, dan Departemen Pendidikan Inggris ini tentu akan menandai pemberdayaan teknologi informasi demi kemanfaatan bagi masyarakat yang tidak mampu memilikinya sendiri. Hal itu tentu akan sangat relevan dengan kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia pada umumnya, dan Irian Jaya pada khususnya, yang pada umumnya tidak mampu memiliki perangkat teknologi informasi.

## PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PUSTAKAWAN

Dari pembahasan tanda-tanda zaman tersebut di atas, telah diketemukan hal-hal yang terkait langsung dengan status dan peranan pustakawan. Sebagai komponen penting dalam pengelolaan dan pelayanan informasi IPTEK yang merupakan motor penggerak kemajuan peradaban, para pustakawan dituntut untuk lebih dahulu memiliki kualitas yang memadai. Mereka juga dituntut untuk benar-benar bersikap dan bertindak profesional.

Penggunaan istilah ‘pustakawan’ sebagai terjemahan dari istilah Inggris ‘librarian’ sesungguhnya kurang tepat. Istilah librarian berpangkal pada kata dasar library yang diterjemahkan dengan perpustakaan, sehingga terjemahan yang tepat mestinya adalah ‘perpustakaanwan.’ Seorang pustakawan memang bukan hanya melulu berurusan dengan pustaka (buku), melainkan terutama dengan sistem perpustakaan yang telah

dibangun dan dikembangkan secara baku di dunia internasional. Jati diri seorang pustakawan adalah ahli sistem perpustakaan, bukan ahli pustaka (bdk. **A.C. Sungkana Hadi**, 1983: v<sup>v</sup>). Dan karena itu tanggung jawab seorang pustakawan adalah menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara sistemik, bukan perpustakaan yang asal-asalan. Itulah sebabnya maka tanggung jawab seorang pustakawan juga bersifat profesional, karena dilandasi oleh adanya suatu sistem yang baku dan berskala internasional.

Profesionalisme kepustakawanan telah sejak lama diakui di dunia Barat sekalipun masih diwarnai dengan pro dan kontra, sebagaimana dikemukakan oleh **Jesse H. Shera** pada tahun 1972<sup>vi</sup>. Kontroversi tersebut berkisar pada keraguan akan adanya pengetahuan teoretis dalam kepustakawanan, serta anggapan bahwa layanan perpustakaan bersifat feminin yang tidak sesuai dengan sifat profesi yang adalah maskulin. Pada akhir dasa warsa 70-an, sejumlah pustakawan penulis seperti **Lester Asheim** (1979)<sup>vii</sup> dan **Bonnie R. Nelson** (1980)<sup>viii</sup>, mengajak untuk menghentikan perdebatan tentang profesionalisme kepustakawanan tersebut dengan meyakini bahwa pekerjaan kepustakawanan didukung oleh semakin berkembangnya pendidikan perpustakaan, serta semakin berkembangnya organisasi profesi seperti *American Library Association* (ALA), *Library Association* (LA – Inggris); bahwa kinerja para pustakawan bisa ditingkatkan, dan para pustakawan selalu berusaha meningkatkannya; dan bahwa pelaksanaan pekerjaan kepustakawanan harus diarahkan kepada tujuan-tujuan profesional yang telah dirumuskan, dan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pengguna perpustakaan.

Di Tanah Air kita profesionalisme kepustakawanan secara formal diakui sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan),

Nomor 18 Tahun 1988. Status pustakawan juga diakui sebagai salah satu **tenaga kependidikan** berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat bahwa menyelenggarakan pendidikan nasional bukan hanya tugas dari pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional melalui lembaga persekolahannya, namun juga tugas seluruh masyarakat, maka sesungguhnya status sebagai tenaga kependidikan bukan hanya berlaku bagi para pustakawan di lingkungan lembaga pendidikan formal, melainkan di semua unit kerja dimana misi mencerdaskan kehidupan bangsa (melalui penyediaan informasi) dapat dilaksanakan. Dengan demikian profesionalisme kepustakawanan berarti kemampuan, status, dan tanggung jawab untuk ikut berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat melalui pengelolaan dan penyediaan layanan informasi di perpustakaan, pusat dokumentasi, atau pusat informasi (Pusdokinfo).

## Peran Profesional

**Margareth Smith**, Kepala Bagian Pelayanan pada Perpustakaan Sekolah Cambridgeshire, Inggris, ketika menyampaikan makalahnya yang berjudul *Learning to love libraries: Children's Library Services* pada Kongres VII Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Ilmiah Nasional tahun 1995<sup>ix</sup>, mengatakan bahwa peranan informasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah menjadi sangat penting, dan bahwa perpustakaan masih dipandang sebagai tempat terbaik untuk mendapatkan informasi tersebut secara cepat dan mutakhir. Peranan pustakawan sekolah, menurut Smith, adalah sebagai guru sekaligus pustakawan, pendidik sekaligus pemberdaya (*enabler*), yakni orang yang mampu memberdayakan kliennya.

Sejalan dengan pokok pikiran di atas, **Putu Laxman Pendit** dalam tulisannya berjudul *Makna informasi: Lanjutan dari sebuah perdebatan*<sup>x</sup>

menyebutkan bahwa tugas dan fungsi pustakawan antara lain adalah mendukung dan memastikan kelancaran **proses pembentukan pengetahuan lewat layanan-layanan informasi** yang diberikannya. Oleh karena itu, pustakawan harus mampu menentukan jenis-jenis informasi yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk meningkatkan pengetahuannya. Dengan kata lain, peran profesional pustakawan yang penting adalah sebagai **penyaji informasi yang relevan dan berkualitas**. Pustakawan harus mampu menyediakan fasilitas, suasana, dan sistem yang memungkinkan pencarian dan penemuan informasi yang relevan dan berkualitas di tengah banjir informasi yang semakin deras melanda para pengguna perpustakaan dan pencari informasi pada umumnya.

Hal tersebut menjadi semakin rumit dan menantang dengan berkembangnya teknologi informasi (TI), yang menurut **Tjuk Suwarso** meningkatkan banjir informasi menjadi **banjir bandang** informasi – banjir yang terus menerus<sup>xi</sup>. Menurut **Melling Simanjuntak**, dengan **internet** yang merupakan produk terunggul dari TI, banyak data dan informasi di Indonesia yang selama ini hanya tercetak secara terbatas – seperti data statistik dari Biro Pusat Statistik – dapat disajikan secara lengkap di perpustakaan maya tanpa dinding tersebut<sup>xii</sup>. Dengan kata lain, TI menimbulkan adanya ‘sungai-sungai’ baru yang membanjirkan informasi yang selama ini tersembunyi dan terbatas.

Sementara itu, dengan internet, menurut **A. Kohar Rony**<sup>xiii</sup>, terwujudlah suatu “konsep perpustakaan terbuka antar dunia yang tidak mengenal batas waktu, batas geografis, seperti batas propinsi atau batas negara. Juga perpustakaan yang tidak menandai kartu penduduk atau kartu pengenalan maupun keterangan asal-usul, bangsa dan agama, serta perpustakaan yang tidak membedakan kelas sosial, politik, ekonomi, maupun kelamin atau umur pemakai. Siapa saja dipersilahkan

memanfaatkan bersama informasi/data yang disajikan secara patungan dan dikelola secara gotong royong.” Melalui internet, siapa saja – termasuk mereka yang belum cukup umur – dapat mengakses apa saja – termasuk bacaan atau gambar bagi mereka yang sudah berumur. Di satu sisi, internet memberikan kemudahan yang lebih besar bagi penggunaannya untuk mengakses informasi seluas-luasnya demi pengayaan pengetahuan; namun di sisi lain, internet juga membuka peluang terjadinya malapetaka akibat terjadinya disinformation, pemerolehan informasi yang salah sasaran.

Di negara maju, dimana warga masyarakatnya telah benar-benar siaga akan informasi, termasuk siaga akan informasi digital dalam internet, mungkin hampir tidak bisa dilakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya ‘malapetaka’ tersebut. Tidak juga tindakan dari pustakawan! Namun di negara yang sedang berkembang, seperti negara kita ini, pustakawan masih mempunyai kewajiban moral yang besar untuk menjadi penyaring informasi – khususnya bagi para pencari informasi yang masih pemula – agar sampah-sampah informasi – termasuk yang ada di internet – bisa disingkirkan. Hal itu karena akses internet belum cukup luas tersedia; dan walaupun tersedia, masih tergolong mahal, sehingga tidak setiap pengguna mampu memperolehnya. Di propinsi ini juga belum cukup berkembang warung-warung internet (warnet) yang dapat membahayakan perkembangan jiwa anak-anak yang telah kecanduan menggunakannya. Salah satu peran profesional pustakawan adalah menjadi **pemandu** yang mampu mengantarkan pengguna menjelajahi samodera informasi dalam berbagai situs internet, namun sekaligus pemandu yang mampu memberikan nasehat yang tepat kepada pengguna dalam memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peran profesional ini akan semakin rumit dan menantang, serta tampaknya tidak akan berkesudahan.

Secara ringkas, peran pustakawan sebagai pengelola sumber informasi adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dan mengembangkan koleksi sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna, mutakhir, dan komprehensif; untuk itu pustakawan perlu sendiri memiliki **kesiagaan informasi** (*information awareness*), yakni kemauan untuk selalu berusaha memperoleh informasi yang mutakhir dan komprehensif, selalu mengikuti perkembangan penerbitan, termasuk untuk peningkatan pengetahuan dan kualitas diri sendiri.
2. Melakukan pengorganisasian koleksi sumber informasi berdasarkan sistem yang handal dan terpercaya, termasuk **sistem yang berbasis TI**, agar setiap carik informasi di dalam koleksi tersebut dapat diketahui keberadaannya, dan dapat diketemukan dengan mudah, cepat dan tepat
3. Melakukan pemanduan bagi pengguna dalam menelusur dan/atau menjelajahi samodera informasi yang semakin luas, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhannya (*the right information for the right user*)
4. Melakukan upaya-upaya promosi dan pembinaan minat baca masyarakat, agar melalui pemanfaatan intensif koleksi sumber informasi yang ada dapat dibangun dan dikembangkan suatu masyarakat yang gemar membaca dan gemar belajar (*reading and learning society*)
5. Melakukan upaya-upaya perekaman informasi dan pengetahuan lokal, termasuk upaya digitalisasi informasi, agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat pengguna tanpa batas ruang dan waktu. Untuk itu pustakawan perlu siaga untuk berkembang menjadi **pengelola ilmu pengetahuan** (*knowledge manager*), bukan hanya pengelola buku, bukan pula hanya pengelola informasi.

## Mendharmabaktikan Profesionalisme Kepustakawanan di Irian Jaya

Hal-hal yang dikemukakan di atas barangkali masih bersifat amat umum dan mungkin sudah banyak diketahui oleh hampir semua pustakawan peserta seminar ini. Yang selanjutnya perlu dibahas bersama tentunya adalah, bagaimana mengaplikasikan semua hal tersebut pada kondisi dan situasi Irian Jaya. Beberapa hal dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pustakawan dan perpustakaan di Irian Jaya perlu mendekatkan koleksi sumber informasi kepada penggunanya, khususnya di daerah yang terpencil. Untuk itu, suatu sistem perpustakaan keliling udara mungkin perlu dipertimbangkan pengembangannya, sebagaimana dikembangkan perpustakaan keliling air/sungai di Kalimantan (Cf. A.C. Sungkana Hadi, 1995: makalah daerah dalam **Kongres VII Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Jakarta tahun 1995**)<sup>xiv</sup> Usulan ini tentunya terkesan muluk-muluk, namun tentu masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan rencana Pemerintah Inggris yang akan meluncurkan perpustakaan maya keliling sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pada era Warintek sekarang ini, pustakawan harus menjadi pelopor dalam pengembangan dan pelayanan warintek di seluruh pelosok Irian Jaya.
2. Pustakawan Irian Jaya dapat berperan aktif dalam melestarikan bahasa-bahasa asli Irian Jaya, sekaligus mengembangkannya sebagai bahasa tulis untuk bahan-bahan bacaan sederhana yang sengaja disusun bagi para penuturnya, sehingga kebuta-aksaraan dapat diberantas.<sup>xv</sup> Ide ini tentunya tidak lepas dari konsekuensi biaya; oleh karena itu kerja sama antara Pusat Pembinaan



Bahasa, Perpustakaan Nasional Propinsi, Kanwil Pendidikan Nasional, dan Ikatan Penerbit di Propinsi ini dalam berpatungan membiayai proyek tersebut sangat diperlukan, masing-masing dengan misinya sendiri, yakni melestarikan bahasa daerah (Pusat Pembinaan Bahasa), memberantas buta aksara (Kanwil Diknas), promosi minat baca dan belajar melalui bacaan (Perpusnasprop), dan menyebarkan publikasi (Ikatan Penerbit).

3. Pustakawan dan perpustakaan di Irian Jaya perlu berperan-serta dalam pengembangan jaringan perpustakaan digital. Hal itu karena di daerah ini tersimpan pengetahuan lokal (*local contents*) yang sangat kaya dan unik (spesifik). Banyak dokumen yang membahas keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman kekayaan sumber daya alam di daerah ini hanya tersimpan di arsip-arsip instansi tanpa pernah diterbitkan. Dengan begitu pengetahuan lokal tersebut tidak dapat dikontribusikan bagi perkembangan peradaban umat manusia, bahkan juga tidak bagi perkembangan kehidupan masyarakat di propinsi ini sendiri sekalipun.

Kalau semua itu dikaitkan kembali dengan era baru yang sedang dipersiapkan realisasinya, yakni era otonomi daerah, maka profesi kepustakawanan harus diabdikan terutama untuk mendukung pemberdayaan sumber daya manusia di propinsi ini agar mereka mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya

prinsip otonomi daerah tersebut. Tulisan ini sengaja tidak membahas lebih jauh mengenai prinsip tersebut, melainkan hanya berasumsi pada prinsip pokok, yakni: memberdayakan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan sendiri kehidupan bermasyarakatnya melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mandiri, lebih leluasa dalam memanfaatkan kekayaan daerah, namun juga sekaligus lebih cermat dan bertanggung-jawab. Oleh karena itu, aspek kemampuan sumber daya manusia tampaknya menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan prinsip otonomi daerah tersebut. SDM yang dimaksud di sini tentunya bukan hanya unsur aparatur pemerintah atau pihak-pihak yang disebut subyek atau pelaku pembangunan, melainkan juga seluruh warga masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan itu. Hal ini penting, karena tanpa pemberdayaan seluruh warga masyarakat sasaran pembangunan, maka amat sulit diharapkan terjadinya partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat secara mandiri.

Dalam konteks pemberdayaan seluruh komponen SDM itulah, maka menurut hemat saya para pustakawan di Irian Jaya – melalui unit kerja/perpustakaan masing-masing – dapat berperan sangat menentukan, yakni dalam menyediakan informasi yang relevan, tepat, dan mutakhir, serta memberikan layanan atasnya secara prima. Untuk itu, kedelapan komitmen profesional yang ditawarkan di atas hendaknya dapat menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan peran profesional pustakawan di propinsi ini.

---

<sup>i</sup> Onno W. Purbo (c1999). *Buku pintar Internet: Teknologi warung internet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

<sup>ii</sup> Endang Ernawati (1998). “Pelayanan prima sebagai strategi pemasaran jasa dokumentasi, informasi, dan perpustakaan.” *BACA*, 23 (4) Desember 1998: 40-47.

- 
- <sup>iii</sup> Andreas Lako (1997). "Tantangan dan prospek profesi pustakawan di era transformasi teknologi informasi abad 21." Dalam: *Perpustakaan menjawab tantangan jaman*, editor F.A. Wiranto, ... [dkk.]. Semarang: Penerbit UNIKA Soegiyapranata; p. 99-106.
- <sup>iv</sup> Bandingkan: A.C. Sungkana Hadi (1998). "Revitalisasi layanan perpustakaan perguruan tinggi di era KPPTJP-III dan era teknologi informasi." Makalah dalam Lokakarya Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ambon, 21-23 Oktober 1998. Kerja Sama UPT Perpustakaan Universitas Pattimura dan Proyek Kerja Sama Kanada.
- <sup>v</sup> A.C. Sungkana Hadi (1983). "Analisis hubungan pengalaman kerja perpustakaan dengan hasil belajar dalam pendidikan profesional perpustakaan pada Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia." Skripsi Program Sarjana Ilmu Perpustakaan FSUI.
- <sup>vi</sup> Jesse H. Shera (1972). *The Foundations of Education for Librarianship*. New York: Becker and Hayes.
- <sup>vii</sup> Lester Asheim (1979). "Librarians as professionals." *Library Trends*, 27 (3) Winter: 225-257.
- <sup>viii</sup> Bonnie R. Nelson (1980). "The Chimera of professionalism." *Library Journal*, 105 (17) 1 October 1980: 2029-2033.
- <sup>ix</sup> Margareth Smith (1996). "Learning to love libraries: Children's library services." Dalam: *Prosiding Kongres VII Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Ilmiah Nasional, Jakarta, 20-23 Nopember 1995*, penyunting Soekarman Kartosedono, ... [dkk.]. Jakarta: Pengurus Besar IPI; jil. 1: 64-77.
- <sup>x</sup> Putu Laxman Pendit (1992). "Makna informasi: Lanjutan dari sebuah perdebatan." Dalam: *Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan tantangan*, editor Antonius Bangun, ... [dkk.]. Jakarta: Kesaint Blanc; p. 63-88.
- <sup>xi</sup> Tjuk Suwarso (1996). "Kiat kerja pustakawan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi." Dalam: *Prosiding Kongres VII Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Ilmiah Nasional, Jakarta, 20-23 Nopember 1995*, penyunting Soekarman Kartosedono, ... [dkk.]. Jakarta: Pengurus Besar IPI; jil. 2: 75-86.
- <sup>xii</sup> Melling Simanjuntak (1996). "Kepustakawanan alternatif." Dalam: *Prosiding Kongres VII Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Ilmiah Nasional, Jakarta, 20-23 Nopember 1995*, penyunting Soekarman Kartosedono, ... [dkk.]. Jakarta: Pengurus Besar IPI; jil. 2: 64-73.
- <sup>xiii</sup> A. Kohar Rony (1996). "Revolusi Internet: Dampaknya terhadap kepustakawanan." Dalam: *Prosiding Kongres VII Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Ilmiah Nasional, Jakarta, 20-23 Nopember 1995*, penyunting Soekarman Kartosedono, ... [dkk.]. Jakarta: Pengurus Besar IPI; jil. 1: 29-51.
- <sup>xiv</sup> A.C. Sungkana Hadi (1995). "Pustakawan dan Kepustakawanan di Irian Jaya." Makalah Daerah IPI Irian Jaya pada Kongres VII Ikatan Pustakawan Indonesia di Jakarta.
- <sup>xv</sup> A.C. Sungkana Hadi (1999). "Irian Jaya Libraries and the Preservation of Indigenous Languages." *Irian: Bulletin of Irian Jaya Research & Development*, 22 (1) April 1999: 48-53.